

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PENGENDALIAN
KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK
KONSTITUSI MASYARAKAT DAN KEPENTINGAN PUBLIK DI
INDONESIA DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA**

**NAMA : Dwi Reza Abdurachman
NRP : 1187066**

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara berkembang tidak lepas dari kebutuhan transportasi guna melangsungkan kegiatan perekonomian masyarakat guna pemenuhan kebutuhan maupun gaya hidup dalam masyarakat. Pemenuhan kebutuhan hidup merupakan kegiatan yang harus dilakukan setiap hari. Untuk mempermudah akses pemenuhan kebutuhan hidup tersebut, masyarakat memerlukan alat transportasi yang nyaman saat ini, yang cenderung lebih memilih kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi guna memenuhi kebutuhan hidup. Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi telah mengakibatkan kepadatan area jalan, hal ini disebabkan jumlah kendaraan bermotor yang sudah tidak sesuai dengan volume jalan yang ada sehingga mengakibatkan kemacetan yang merugikan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya upaya pengendalian kendaraan bermotor guna meminimalisir kemacetan. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya pengkajian pengendalian kendaraan bermotor sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusi masyarakat dan kepentingan publik dilihat dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara. Di samping itu, perlu dikaji bentuk-bentuk pengendalian kendaraan dengan menganalisis kebijakan pengendalian yang telah dilakukan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Adapun sifat dari penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, penelusuran internet. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mengkaji pengaturan pengendalian kendaraan bermotor jika dilihat dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara, serta mengetahui dan mengkaji bentuk-bentuk kebijakan pengendalian lainnya dalam kerangka perlindungan hak konstitusi

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dilihat dari Hukum Administrasi Negara, kebijakan pengendalian kendaraan bermotor merupakan suatu instrumen yang digunakan meminimalisir kemacetan lalu lintas. Kebijakan pengendalian ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan sebagai suatu langkah preventif maupun represif. Di sisi lain, kebijakan pengendalian kendaraan bermotor menunjukkan bahwa Hukum Administrasi Negara telah menjalankan fungsinya sebagai instrumen jaminan dan normatif. Namun demikian pengendalian yang telah dilakukan belum sepenuhnya berjalan secara efektif, untuk itu perlu adanya bentuk-bentuk pengendalian lain seperti meningkatkan dan memperketat pengaturan pajak progresif yang dilakukan oleh pemerintah, membatasi dan meningkatkan bea masuk kendaraan import ke Indonesia, memperbaiki sarana transportasi umum dan sarana umum agar masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi umum, Penerapan sitem jalan berbayar (ERP),

Pelarangan penggunaan kendaraan tua diatas 10 taun kecuali pada hari Sabtu dan Minggu, Penerapan plat nomor ganjil genal. Berdasarkan uraian tersebut, maka hal di atas pengendalian kendarran bermotor tidak hanya menjadi urusan pemerintah pusat saja, peran pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten sangat diperlukan agar setiap daerah bisa mengontrol permasalahan kendaraan bermotor di daerahnya.

Kata Kunci : Kebijakan Pengendalian, Konstitusi, Kepentingan Publik



**THE JURIDICAL OBSERVATION TOWARD POLICIES OF VEHICLE
RESTRAINT IN ORDER TO CITIZEN'S CONSTITUTION RIGHT PROTECTION
AND PUBLIC INTEREST IN INDONESIA REVIEWED FROM PERSPECTIVE
OF STATE ADMINISTRATION LAW**

Name : Dwi Reza Abdurachman

NRP :1187066

ABSTRACT

As a developing country, Indonesia has got a high demand about transportation in order to do economic or citizen activity. The fulfillment of life necessity is a daily activity. These days, citizen needs comfy transportation to facilitate that fulfillment. Many of them prefer to choose personal vehicle as transportation. Personal vehicle has been abundantly increasing, this causes crowd on the road. The amount of vehicle does not suit the volume of the road. Then, traffic always appears and makes citizen harm. Therefore, it needs an effort to control vehicle to reduce traffic. Furthermore, it needs an assesment of vehicle control as a consitution right of citizen and public importance seen from State Administration Law. Besides, it is needed to knowledge the kinds of vehicle control by analysing the exist controlling policies.

The method used in this project is *juridis normative*, which means law research done by examining book materials using secondary data which consists of primary, secondary, and tertiary materials. Then, the characteristic of this research is *analytis descriptive*. This is a research that aims to illustrate about reality of the object which is objectively examined. The technic of data aggregation is through literature study, regulation of legislation, papers, and internet browsing. The objective of this research is to find out and knowledge vehicle control arrangement if seen from State Administration Law, and to find out and knowledge the other control policies in the framework of constitution right protection.

From this research, it can be concluded that if seen from State Administration Law, the policies of vehicle control are the instrument used to reduce traffic jam. The policies are decided by regulation of legislation as a preventive or repressive pace. On the other hand, these policies show that State Administration Law has been very useful as assurance and normative instrument. However, the restraint done is not that effective, we need some other restraint such as raising and tightening the arrangement of progressive tax done by government, limiting and raising vehicle import cost to Indonesia, repairing public transportation so that citizen is preferring to use public transportation, the assembling of ERP, prohibition of using old vehicle above 10 years except on weekends, the assembling of even or uneven metal sheet. Based on this disantangle, the restraint of vehicle is not only government's task, the role of of province government and city/county government is needed in order to control the vehicle problem in their areas.

Key word : the poliy control, constitutional court, their public

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
PERNYATAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA.....	iv
PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI SIDANG.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Sasaran Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	19

**BAB II KEBIJAKAN ADMINISTRASI NEGARA DAN
PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP PEMENUHAN
HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT**

A. Kedudukan Hukum Administrasi Negara Di Indonesia.....	22
B. Aspek Kebijakan Administrasi Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia.....	33
C. Perlindungan Negara Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusi Masyarakat.....	41

**BAB III PENGATURAN DAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN SERTA PERAN PEMERINTAH
DALAM PENGENDALIAN KENDARAAN BERMOTOR**

A. Pengaturan, Pengawasan Dan Pengendalian Kendaraan Bermotor Di Indonesia.....	55
B. Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Konstitusi Masyarakat.....	63
C. Perlindungan sebagai Salah Satu Bentuk Hak Konstitusi.....	88

**BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PENGENDALAIN
KENDARAAN BERMOTOR DAN PERLINDUNGAN
TERHADAP HAK KONSTITUSI MASYAARAKAT
DAN KEPENTINGAN PUBLIK**

A. Kebijakan Pengendalian Kendaraan Bermotor Sebagai Pemenuhan Hak Konstitusi Masyarakat Ditinjau dari hukum administrasi negara dan Kepentingan publik..... 94

B. Bentuk Pengendalian Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat dan Kepentingan Publik..... 100

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... **107**

B. Saran..... **108**

DAFTAR PUSTAKA x

LAMPIRAN xi